

## Perubahan Strategi Politik Partai Ennahda di Tunisia Tahun 2016

**Ali Hasemi; M. Nur Hasan; Pra Adi Soelistijono**

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember,  
Jember 68121, Indonesia

e-mail: [mnurhasan56@yahoo.com](mailto:mnurhasan56@yahoo.com)

### **Abstract**

*Ennahda is the name of one of the political parties in Tunisia which initially moved within the Islamism ideological direction. But when Ennahda elected became the head of government in 2011, the party became more compromised with political reality around and set out the rational choice while determining its political attitudes and actions. In 2015, Ennahda formed a coalition government with electoral winning parties as well as political rivals from the pro-secularist group, the Nidaa Tounes party. Some of Ennahda's loyal supporters, their party's policy is seen as a form of betrayal of his own ideological values because its acceptance for the notion of secularism and those step is considered as a deviation from Islamic beliefs. Moreover, at the 10th congress on May 20, 2016, Ennahda, which was previously seen as a symbol of the Islamism party, issued an official statement that its party separate itself between religious and political activities. Therefore, this study aims to explain the reasons and factors that led to changes in political strategy that occurred in the Ennahda party in Tunisia. The analysis of changes in Ennahda's political strategy will be reviewed through the concept of Post-Islamism. In order to support the discussion of this study, the author uses secondary data collected through library research studies and analyzed using qualitative descriptive methods. The results showed that the reasons and factors that led to changes in the political strategy of the Ennahda party at Tunisia in 2016 were due to: new political challenges, That is the pluralistic condition of political environment and the demands of compromise in order to build a civil society; the emergence of hardline Islamic movements and extremist groups in Tunisia; the events of the military coup over the Muslim Brotherhood in Egypt in 2013; and an increasing in public dissatisfaction with the party-led government coalition.*

**Kata Kunci** : Ennahda, Islamisme, *Post-islamism*

### **1. Pendahuluan**

Awal mula kemunculan Ennahda dapat ditelusuri pada tahun 1967, ketika Mesir, Jordan dan Suriah mengalami kekalahan dalam perang melawan Israel yang dikenal dengan peristiwa *Six Day war* (Wolf, 2017:33). Akibatnya, banyak pihak mengkritisi pemikiran politik sekularisme dan nasionalisme Arab yang diterapkan pada masa itu. Hal tersebut kemudian disusul dengan kemunculan gerakan-gerakan politik Islam di Tunisia dan beberapa negara Timur Tengah. Salah satu dari gerakan kelompok Islam tersebut ialah ASQ (*Association for the Safeguard of the Qur'an*) yang berada di Tunisia (Internationalrelations.org, tanpa tahun). ASQ dibentuk pada tahun 1967 oleh rezim Bourguiba untuk memfasilitasi aspirasi dan kegiatan kelompok Islamis pada masa itu. Tujuan lain dari dibentuknya ASQ adalah ntuk mengendalikan gerakan kelompok Islamis (Alexander, 2016:47). Sehingga, kelompok Islamis mengeluhkan pembatasan ruang gerak yang diberikan oleh pemerintah terhadap mereka. Oleh karena itu, para pemikir religius kemudian membentuk *al-Jama'a al-Islamiyya* (kelompok Islam). Organisasi yang dibentuk oleh para pemikir religius ini memfungsikan dirinya sebagai kelompok agama yang fokus pada gerakan dakwah agama Islam dan studi al-Quran. Organisasi inilah yang menjadi bibit awal dari kemunculan entitas Ennahda di waktu mendatang. Melalui organisasi ini, kelompok Islamis bertujuan untuk ikut andil memberi kontribusi tidak hanya dalam ruang privat, namun

menghidupkan kembali Islam dalam ruang publik, termasuk masjid-masjid, asosiasi-asosiasi dan fasilitas pendidikan.

Pada perkembangan selanjutnya, gerakan kelompok Islam di Tunisia tersebut tidak hanya aktif dalam gerakan keagamaan saja, namun juga dalam isu-isu budaya di dalam negeri dan kawasan Afrika. Kelompok gerakan Islamis tersebut menyikapi persoalan-persoalan militer Arab dan krisis sosial sebagai akibat negatif yang timbul dari ideologi dan nilai budaya asing. Pada tahun 1979, pergerakan kelompok Islamis *al-Jama'a al-Islamiyya* pada akhirnya berubah dari gerakan sosial menjadi organisasi yang berorientasi politik yang dinamakan MTI (*Mouvement de la Tendance Islamique; Harakat al-Ittihad al-Islami*) (Wolf, 2017:8). Sejak awal pembentukannya, MTI menjadi wadah organisasi kubu konservatif dan Islamis di Tunisia yang merasa terancam dengan perlakuan Habib Bourguiba. Rezim Habib Bourguiba dianggap memerintah dengan corak yang sekuler, menjalankan kebijakan politiknya melalui cara yang represif, dan berusaha memanipulasi interpretasi Islam untuk memonopoli kontrol politik sehingga kelompok Islamis tersebut sering bertentangan langsung dengan pemerintahan pada masa tersebut (Souli, 2016a).

Situasi politik Tunisia mengalami perubahan ketika Rezim Presiden Habib Bourguiba digulingkan oleh Zine El Abidine Ben Ali di tahun 1987. Pada tahun-tahun awal Ben Ali berkuasa, MTI kembali mencoba untuk mendapatkan pengakuan secara legal. Tetapi adanya aturan hukum di Tunisia yang melarang pembentukan partai yang berdasarkan alasan etnis, agama, ras, dan wilayah geografis atau teritorial. Sehingga kelompok Islamis kemudian mengubah nama dan karakteristiknya yang berkaitan langsung dengan aspek religius dalam rangka mendapatkan legalitas tersebut karena (Wolf, 2017:69) Kelompok pergerakan Islamis tersebut untuk ketiga kalinya mengubah namanya menjadi partai 'Ennahda' yang berarti 'kebangkitan kembali'.

Rezim Zine El Abidine Ben Ali tidak jauh berbeda dari rezim pemerintahan sebelumnya (Habib Bourguiba) sehingga Ennahda mengalami masa-masa sulit akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintahan. Rezim Ben Ali mempersulit gerak-gerik para penentang pemerintahannya, mengendalikan lembaga peradilan dan kepolisian untuk kepentingannya, bahkan mengecap kelompok Islamis yang menentang dirinya sebagai kelompok ekstrimis dan teroris (Louden, 2015). pada masa tersebut, kondisi pergerakan partai Islam (termasuk Ennahda) mengalami represi yang cukup serius dari pemerintah.

Hingga pada tanggal 17 Desember 2010 di daerah Sidi Bouzid, seorang warga Tunisia yang bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes terhadap seorang polisi wanita yang menyita keranjang sayurnya. Satu hari pasca insiden tersebut, kemarahan publik muncul dengan cepat hingga memicu pemberontakan warga Tunisia yang dinamakan *Tsaurat al Karama* (Revolusi Martabat). Peristiwa ini kemudian memicu kemunculan protes besar-besaran dari warga Tunisia terhadap pemerintahannya pada tahun 2010 yang menjadi titik awal fenomena "*Arab Spring*". Protes dan pemberontakan warga Tunisia tersebut pada akhirnya berhasil menjatuhkan rezim Zine El Abidine Ben Ali pada 14 Januari 2011 (Ayari, 2015).

Setelah terbebas dari rezim Ben Ali, Ennahda mulai berkampanye dalam pemilihan parlemen pada 2011. Adanya popularitas Ennahda yang tinggi serta nilai keislaman (non-sekuler) sebagai identitasnya membuat Ennahda mampu memenangkan suara dalam pemilihan parlemen untuk majelis konstituante. Namun sejak Ennahda memegang kendali pemerintahan pada tahun 2011 - 2013, Ennahda secara perlahan telah menunjukkan perubahan menuju sikap politik yang lebih moderat. Meskipun menyandang identitas sebagai partai Islamis, Ennahda masih membuka diri untuk bekerja sama di dalam parlemen dengan

partai haluan sekularisme. Ennahda bersedia untuk berkompromi dan bekerja di dalam sistem parlemen campuran. Padahal sebelumnya Ennahda pada awalnya menyerukan sistem parlementer secara eksklusif. Ennahda juga menyetujui untuk menyusun konstitusi baru Tunisia berdasarkan mekanisme demokrasi, peraturan hukum, dan berbagai hak-hak agama, sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan (Ghannouchi, 2016). Walaupun, Ennahda masih berupaya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam agenda politiknya, seperti usaha Ennahda dalam memasukkan gagasan Islam ke dalam konstitusi Tunisia.

Tetapi kemenangan Ennahda tidak berlangsung lama. Ennahda mengalami kemunduran pada tahun 2013 akibat tekanan politik dari kelompok-kelompok oposisi. Kebijakan Ennahda dinilai tidak efektif dalam memerangi terorisme di Tunisia, tidak mampu memperbaiki perekonomian dalam negeri, dan dituduh sebagai dalang dari peristiwa pembunuhan pemimpin oposisi, Mohamed Brahmi (Guazzone, 2013). Atas desakan dari kelompok-kelompok oposisi, Ennahda membuat kesepakatan dengan mereka untuk mengundurkan diri dari kekuasaan pada bulan Januari 2014 dan menyerahkan pemerintahan sementara kepada teknokrat atau non-partisan sampai pemilu selanjutnya. Pada tanggal 27 Januari 2014, Ennahda berhasil memasukkan gagasan Islam ke dalam undang-undang di Pasal 1, yang telah menetapkan bahwa Islam adalah agama resmi Tunisia dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi segala sesuatu yang dinilai sakral (Ayari, 2015; Wolf, 2017:156).

Ennahda kembali mengikuti pemilu pada tanggal 21 Desember 2014 tetapi dikalahkan oleh partai Nidaa Tounes pimpinan Beji Caid Essebsi yang berpaham sekularisme. Walaupun kalah dalam pemilu, Ennahda masih memperoleh 69 kursi dari 217 kursi di dalam parlemen. Namun, Ada 28 anggota legislatif Nidaa Tounes telah mengundurkan diri dari partai, mengurangi kursi parlemennya dari 86 menjadi 58 kursi. Dengan demikian, Ennahda yang memiliki 69 kursi sekali lagi menjadi kekuatan terbesar di parlemen (The Guardian, 2014; Wolf, 2017:160). Pada tahun 2015 kemudian, Ennahda membuat suatu langkah yang mengejutkan banyak pihak dan belum pernah terdengar sebelumnya yaitu membentuk pemerintahan koalisi dengan partai pemenang, Nidaa Tounes (Bleiweis, 2016). Kebijakan Ennahda dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai ideologinya sendiri karena menerima paham sekularisme dan langkah tersebut dianggap sebagai penyimpangan dari keyakinan Islam. Terlebih lagi, pada kongres ke-10 tanggal 20 Mei 2016, Ennahda yang sebelumnya dipandang sebagai partai yang menganut Islamisme, mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa partainya memisahkan diri dari aktivitas keagamaan dan politik

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Rachid Ghannouchi di hadapan publik dalam kongres. Rachid Ghannouchi selaku politisi terkemuka dan pendiri partai Ennahda, menjelaskan bahwa Ennahda akan memberikan perlindungan konstitusi bagi kelompok non-muslim maupun yang atheis, serta memberi sebutan baru bagi partainya dengan nama "Demokrat Muslim" sehingga gerakan partainya akan bersikap yang lebih moderat terhadap kelompok muslim maupun kelompok non-muslim (Ibish, 2016).

Tentu hal ini merupakan langkah besar bagi Ennahda yang sebelumnya mengimplementasikan syariat Islam sebagai pandangan politiknya serta memiliki hubungan yang dekat dengan Ihwanul Muslimin, kemudian mengubah haluan gerakannya dengan mengambil jalan yang berbeda dengan ideologi sebelumnya (Wolf, 2017:6). Evolusi peran politik Ennahda bisa menjadi figur politik Islam yang berpengaruh luas terhadap kawasan Arab khususnya organisasi Islam internasional karena menolak taktik atau strategi politisasi agama Islam namun tetap menjadikan agama sebagai pedoman kehidupan masyarakat sosial.

## Landasan Pemikiran

Dalam artikel ilmiah ini, Penulis menggunakan Konsep Post-Islamisme dalam melakukan analisis perubahan strategi politik Ennahda di Tunisia pada tahun 2016.

### A. Post Islamisme

Gagasan *Post-Islamism* secara umum muncul sebagai jawaban dari ketidakmampuan Islamisme dalam menangani persoalan-persoalan proses perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik dari perkembangan dinamika global. Ide dari *Post-Islamism* dapat ditandai dengan adanya upaya membatasi peranan politisasi agama Islam (Bayat, 1996). Sebelum masuk dalam penjelasan secara komprehensif, perlu kiranya penulis untuk menjelaskan perbedaan istilah Islamisme dan *Post-Islamism* untuk menghindari kesalahan dalam memahami kedua konsep tersebut.

Islamisme atau Islam politik mengacu pada gagasan bahwa Islam tidak hanya menyediakan pedoman untuk kehidupan sosial dan pribadi, tapi juga untuk ruang politik. Islamisme berasal dari interpretasi politik Islam sehingga menghasilkan suatu tatanan kehidupan politik yang sarat akan simbol dan entitas keagamaan (Tibi, 2012:1). Islamisme dapat diidentifikasi sebagai ideologi yang menghubungkan *din* (agama) dengan *dawla* (negara) dalam tatanan politik berbasis *syari'ah* (Tibi, 2012:2). Singkatnya, istilah Islamisme mengacu ke Islam yang digunakan untuk tujuan politik (Koch, 2014).

Oliver Roy mendefinisikan Islamisme sebagai "suatu jenis fundamentalisme Islam dalam konteks politik modern yang bertujuan untuk menciptakan kembali suatu tatanan masyarakat Islam sejati". Dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat tersebut, Islamisme bukan hanya mengulas tentang masalah penerapan *syari'ah*, namun juga hal-hal yang berkaitan dengan pendirian sebuah negara Islam melalui aksi politik. Lebih lanjut Roy berpendapat bahwa Islamis menganggap Islam tidak hanya sebagai sebuah agama, namun memandangnya sebagai sebuah "ideologi politik yang seharusnya diimplementasikan dalam rangka membentuk ulang setiap aspek kehidupan sosial" (Koch, 2014).

Islamisme tidak memberikan ruang kompromi dalam menghadapi isu-isu globalisasi dan modernitas, karena "gerakan yang sakral" ini tidak boleh dicemari dengan pemikiran asing. Berdasarkan pertimbangan *syari'ah* yang mereka terapkan, gerakan-gerakan Islamis ini menolak pembagian kekuasaan dengan partai-partai sekuler atau minoritas non-Muslim. Mereka hanya mengakui bahwa *syari'ah* harus diterapkan secara menyeluruh atau totaliter (Tibi, 2012:123). Meskipun pada konteks pemilihan pemimpin, kelompok Islamis terkadang memilih pemimpin mereka dengan menggunakan instrumen demokrasi (seperti melakukan *voting* atau menggunakan kotak suara). Namun, konsep-konsep penting dalam demokrasi seperti kebebasan pers tidak diperbolehkan mendapatkan ruang. Sebab, menurut kelompok Islamis, nilai pluralisme dan toleransi terhadap keberagaman harus ditolak karena dianggap sumber masalah perpecahan umat (Tibi, 2012:123).

Kondisi sosial dan budaya kontemporer yang telah dialami oleh masyarakat di dunia muslim membuat mereka harus mencari formula baru untuk menyelenggarakan sistem politik dan pemerintahannya. Sebab, sistem Islamisme dinilai tidak mampu menyesuaikan diri dengan budaya pluralisme dan modernitas sehingga menjadi hambatan untuk kemajuan negara yang kompetitif. Pada perkembangan berikutnya, kaum Islamis mencoba untuk menelaraskan konsep Islamisme ke dalam segala aspek kehidupan modern, seperti yang dikatakan oleh Yvonne Haddad, "untuk mengislamisasikan modernitas, daripada memodernisasikan Islam" (Machairas, 2017). Oleh karena itu, *Post-Islamism* muncul sebagai

alternatif baru dari dua posisi ideologi ekstrem, yaitu Sekularisme dan Islamisme (Hossain, 2016).

*Post-Islamism* mulai menjadi topik pembahasan di kancah internasional pasca revolusi Iran yang terjadi pada Februari 1979 (Bayat, 1996). Sejak peristiwa revolusi tersebut, masyarakat dunia mulai memberi perhatian pada perkembangan gerakan kelompok Islam politik. Mereka terus melakukan pengkajian dan penyelidikan mengenai apakah gagasan Islamisme mampu diterapkan ke dalam pemerintahan atau tidak. Pembahasan mengenai kompatibilitas Islam dengan politik demokrasi terus berkembang pasca Revolusi Iran yang dipimpin oleh mullah atau santri Islam.

Haluan *Post-Islamism* berbeda dengan ideologi politik Islamisme yang menolak nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi, toleransi pluralisme (Tibi, 2012:116-117), dan kesetaraan gender (Tibi, 2012:6-7). Asef Bayat mengartikan *Post-Islamism* sebagai kondisi ide-ide Islamisme, simbol-simbol dan upaya Islamisasi dalam setiap bidang persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah kehilangan daya tariknya. Sebab, kehadiran Islamisme dinilai tidak mampu menjawab persoalan-persoalan proses perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik dari perkembangan dinamika global. Gagasan *Post-Islamism* muncul sebagai jawaban dari ketidakmampuan Islamisme dalam menangani persoalan-persoalan tersebut. Ide dari *Post-Islamism* dapat ditandai dengan adanya upaya membatasi peranan politisasi agama Islam (Bayat, 1996).

Dalam menjalankan pemerintahan, negara berhaluan *Post-Islamism* tidak lagi memperjuangkan berdirinya negara berlandaskan *syari'ah* Islam. Namun, negara akan menampung beberapa aspek sekularisme pasif dan Islamisme pasif dalam kerangka demokrasi sehingga akan membentuk pola rumusan baru yang mencakup kepentingan masyarakat plural. Undang-undang akan dibuat tidak hanya untuk mengkhususkan kepentingan etnis tertentu, namun untuk mewakili setiap kelompok masyarakat dengan suatu fokus pada pembangunan ekonomi, keadilan (*equity*), yang disertai dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan keadilan sosial ekonomi yang lebih luas. Contoh Indonesia, mewakili identitas gabungan di mana tidak ada dominasi sekularisme maupun Islamisme, tapi beberapa unsur dari keduanya ada di dalam kerangka pengaturan demokratis.

Menurut prinsip demokrasi Hotelling-Downs, jika ada dua partai politik besar atau kelompok mewakili preferensi para pemilih berhaluan sekularisme atau Islamisme, maka akan muncul suatu sistem politik yang stabil. *Pos-Islamism* yang di terapkan pada beberapa negara di dunia ini telah beralih dari interpretasi teokratis Islam menuju penekanan pada kontribusinya terhadap budaya dan peradaban (Hossain, 2016).

## **2. Metodologi**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

## **3. Hasil dan Diskusi**

Keputusan Ennahda yang memisahkan aktivitas politik dan agama mengacu pada gagasan bahwa Islamisme, simbol-simbol maupun upaya Islamisasi pada setiap bidang persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah kehilangan daya tariknya. Sebab, kehadiran Islamisme dinilai tidak mampu menjawab persoalan-persoalan proses perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik dari perkembangan dinamika global. Dalam konteks

pemerintahan pasca rezim otoriter Zine El Abidine Ben Ali, gagasan serta agenda-agenda Islamisme menjadi tidak relevan, karena adanya tuntutan demokratisasi dari rakyat. Ennahda menjadi lebih kompromi dengan realitas politik yang ada dan mengedepankan pilihan rasional dalam menentukan sikap maupun pilihan politik. Sehingga Ennahda mengubah haluan strategi politik partainya pada tahun 2016 dari awalnya yang bercorak Islamisme, kemudian berubah menjadi *Post-Islamism*.

Ada beberapa peristiwa domestik dan internasional yang memiliki hubungan secara politis dengan Ennahda. Beberapa peristiwa berikut ini menjadi alasan dan faktor penting bagi Ennahda, yang sebelumnya merupakan representasi partai politik Islamis, kemudian mengubah struktur pergerakannya menjadi sebuah partai politik murni. Beberapa faktor yang dimaksud yaitu: adanya kondisi lingkungan politik yang plural dan tuntutan kompromistik dengan aktor-aktor politik oposisi; kemunculan gerakan Islam garis keras serta kelompok ekstremis di Tunisia; dan pelemahan daya tarik simbol gerakan Islamisme yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai Islamis Ennahda.

### **Reformasi Politik Partai Ennahda**

Pada periode rezim Habib Bourguiba dan rezim Zine El Abidine Ben Ali, Ennahda memperjuangkan platformnya atas dasar politik identitas. Namun sejak dilegalkan sebagai partai politik pada bulan Maret 2011, Ennahda lebih menampakkan strategi politik moderasi yang ditandai dengan kebijakan inklusif selama periode transisi demokrasi, khususnya ketika dalam menjalankan pemerintahan di Tunisia. Dalam konteks peran yang akan dimainkan Ennahda pada masa transisi demokrasi di Tunisia, moderasi disamakan dengan penerimaan mekanisme demokrasi, penghormatan terhadap prinsip kebebasan yang mendasar, dan dukungan formal untuk membangun masyarakat madani (*civil society*). Hal ini tidak terlepas dari peran seorang pemikir intelektual Islamis terkemuka dan termasuk pendiri Ennahda, Rachid Ghannouchi, yang merancang sistem pemikiran alternatif bagi Ennahda. Sehingga, pada akhirnya Ennahda berhasil memoderasi diri jauh sebelum peristiwa pemberontakan Arab yang terjadi pada tahun 2010.

Secara struktural organisasi, awal mula entitas Ennahda di Tunisia ialah gerakan dakwah yang bernama *al-Jamaa al-Islamiyya* (Kelompok Islam), yang didirikan pada tahun 1972. Pada tahap selanjutnya, gerakan tersebut berubah menjadi gerakan politik yang bernama MTI (*Mouvement de la Tendance Islamique; Harakat al-Ittijah al-Islami*) pada tahun 1979 (Wolf, 2017:50). Namun karena regulasi pada masa rezim Ben Ali melarang penggunaan lambang agama sebagai gerakan politik, maka pada tahun 1989 kelompok tersebut mengubah namanya menjadi Harakat Ennahda atau 'Gerakan *Renaissance*' (Gerakan Kebangkitan). Meskipun bentuk organisasi tersebut kerap mengalami perubahan, misi yang dibawa oleh kelompok tersebut sama, bahwa agenda utamanya adalah memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam aspek kehidupan sosial maupun politik. Sehingga pada masa sebelum Arab Spring, kelompok tersebut sangat terpengaruh dengan ideologi pan-Islam yang disebarkan oleh Ikhwanul Muslimin dan berusaha untuk mewujudkannya. Fokus gerakan kelompok Islamis tersebut selain pada gerakan dakwah, mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam sosial, juga meluncurkan gerakan budaya dan intelektual Islam, dan utamanya adalah menentang otoritarianisme serta mengembangkan dan mewujudkan ideal modern untuk pemerintahan Islam.

Pasca Arab Spring, Ennahda mengalami perubahan yang signifikan bagi sebuah kelompok yang memperjuangkan agenda Islamis. Maka secara ideologis, Ennahda

memutuskan untuk meninggalkan politik identitas, dan menerapkan strategi politik yang lebih berpusat pada kebijakan praktis. Rachid Ghannouchi menjelaskan bahwa:

*“A modern state is not run through ideologies, big slogans and political wrangling, but rather through practical programs”* (Affan, 2016). (Negara modern tidak dijalankan melalui ideologi, slogan besar dan perselisihan politik, tetapi melalui program-program praktis).

Pada tahap lebih lanjut, Rachid Ghannouchi di dalam kongres ke-10 tanggal 20 Mei 2016 menegaskan bahwa:

*“Ennahda has changed from an ideological movement engaged in the struggle for identity to a protest movement against the authoritarian regime and now to a national democratic party. We must keep religion far from political struggles”* (Souli, 2016b). (Ennahda telah berubah dari gerakan ideologis yang mengajak untuk berjuang meraih identitas ke gerakan protes melawan rezim otoriter dan sekarang menjadi partai demokratik nasional. Kita harus menjaga agama agar jauh dari perjuangan politik).

Pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa partai Ennahda tidak lagi bergerak dalam bidang dakwah, namun murni menjadi gerakan politik murni.

Memang sejak awal, Ennahda secara perlahan telah menunjukkan perubahan menuju sikap politik yang lebih moderat sejak periode pemerintahannya. Hal ini bisa dilihat pada keputusan akhir Ennahda yang bersedia untuk berkompromi dan bekerja di dalam sistem parlemen campuran. Ennahda akhirnya membuka diri untuk bekerja sama di dalam parlemen dengan partai haluan sekularisme (Ghannouchi, 2016). Hal yang lebih jelas lagi, bisa dilihat ketika pada tanggal 26 Maret 2012, Ennahda membuat keputusan bahwa syariah tidak akan dimasukkan ke dalam konstitusi (Wolf, 2017:139). Namun, ada perbedaan sikap politik Ennahda di masa pemerintahannya dengan keputusan partai tersebut pada tahun 2016 yang tegas memisahkan aktivitas agama dan politik. Bila keputusan Ennahda pada tahun 2016 menghasilkan platform politik baru yang menolak Islam politik, maka pada periode pemerintahan partai tersebut di tahun 2011-2013 tampak masih ada perjuangan politik yang terindikasi ideologi Islamisme. Hal ini tampak pada keberhasilan usaha Ennahda dalam memasukkan gagasan Islam ke dalam konstitusi. Pasal 1 dalam undang-undang, yang pada 27 Januari 2014, telah menetapkan Islam sebagai agama resmi Tunisia dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi segala sesuatu yang dinilai sakral (Ayari, 2015). Preambul konstitusi tersebut merefleksikan identitas muslim Arab Tunisia. Selain itu, adanya kalimat ‘negara sebagai pelindung segala sesuatu yang dianggap sakral’ dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencegah penistaan terhadap agama. Ennahda pada periode pemerintahannya juga masih berupaya untuk menjalankan agenda Islamisme, seperti pembahasan tentang prinsip gender atau emansipasi wanita. Meskipun pada akhirnya, Ennahda menyetujui tuntutan kelompok sekuler terkait permasalahan emansipasi wanita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rachid Ghannouchi:

*“Women’s rights ‘are nowadays part of Tunisian identity. So Tunisia’s Islamists try to adapt Islam to [this] reality”* (Hak-hak perempuan ‘saat ini menjadi bagian dari identitas Tunisia. Jadi para Islamis Tunisia mencoba menyesuaikan Islam dengan kenyataan [ini])(Wolf, 2017:141).

Hal ini menunjukkan bahwa, ketika Ennahda dihadapkan tekanan sosial-politik yang cukup dari para aktor politik, Ennahda bersedia membuat konsesi yang signifikan. Meskipun sikap dan perilaku politik Ennahda tersebut berarti mengorbankan nilai-nilai Islamisme yang kaku dan merangkul interpretasi yang sangat fleksibel dari ajaran Islam, untuk memenuhi ‘tuntutan

khusus' masyarakat Tunisia. Sehingga menurut penulis, adanya kondisi lingkungan politik yang plural dan tuntutan kompromistik dengan aktor-aktor politik oposisi menjadi sebab bagi Ennahda mengubah haluan strategi politiknya pada tahun 2016 menjadi entitas murni 'partai politik' yang tidak lagi menyandang simbol atau memperjuangkan agenda-agenda Islamisme.

### **Kegagalan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada Tahun 2013**

Pasca rezim Husni Mubarak mengundurkan diri pada tanggal 11 Februari 2011, Ikhwanul Muslimin muncul sebagai salah satu kekuatan politik utama di Mesir. Mohammad Morsi Isa El-Ayyat maju menduduki posisi presiden di Mesir pada tanggal 30 Juni 2012. Mohammad Morsi merupakan presiden pertama Mesir dari kalangan sipil dan terpilih secara demokratis dalam sebuah pemilihan umum yang jujur dan adil (Tempo.co, 2013). Partai yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin pada bulan Juni 2011 dan diketuai oleh Dr. Mohamed Morsi, FJP (*Freedom and Justice Party*), juga berhasil memenangkan pemilihan parlemen pertama setelah pemberontakan terhadap rezim Husni Mubarak. Namun, hanya dalam kurun waktu sekitar satu tahun, Morsi tidak dapat menjalankan negara secara efektif dan gagal memenuhi tuntutan pemberontakan pada bulan Januari (pemberontakan terhadap rezim Husni Mubarak). Aksi protes massa melibatkan 14 juta orang yang turun ke Jalanan pada tanggal 30 Juni 2013, menyuarakan kekecewaannya terhadap Morsi yang dianggap membuat Mesir terpuruk di bidang ekonomi, keamanan, energi hingga diplomasi (Julio, 2017). Demonstrasi massa tersebut mengakibatkan militer untuk mengambil kendali pemerintahan dalam kudeta pada tanggal 3 Juli 2013 (al-Anani, 2015).

Kegagalan pemerintahan Morsi dalam membentuk pemerintahan yang demokratis mengakibatkan terjadinya peristiwa kudeta militer di Mesir pada tahun 2013. Hal ini diperkuat dengan sikap para aktor politik yakni lembaga-lembaga utama negara seperti lembaga peradilan, kementerian dalam negeri dan militer maupun militer, yang tidak menunjukkan dukungannya terhadap demokrasi. Sikap aktor politik yang dimaksud ialah 'keengganan' atau penolakannya berada di bawah komando pemerintahan Ikhwanul Muslimin.

Pemerintahan Morsi juga gagal merangkul kelompok oposisi maupun elit sekuler dalam isu permasalahan penyusunan konstitusi. Kelompok Islamis dan sekuler saling mempertahankan kepentingan serta ideologinya sehingga tidak pernah mencapai mufakat. Obsesi Morsi untuk menyusun dan mempertahankan syariat Islam sebagai landasan konstitusi menjadi penyebab utama perpecahan antar kelompok tersebut. Konservatisme serta kurangnya pola pikir dan agenda revolusioner, adalah penyebab utama yang menghantarkan Ikhwanul Muslimin menuju kegagalan. Kecenderungan konservatif ini juga yang menyebabkan para aktivis yang kehilangan kepercayaan pada kemampuan Morsi untuk membangun sistem politik yang demokratis, sehingga banyak pihak malah berbalik menentanginya. Kegagalan Morsi dalam memenuhi tuntutan reformasi pada bidang sosial, politik, dan ekonomi pasca penggulingan rezim Husni Mubarak berakibat kerusuhan yang berkelanjutan, sehingga menjadi alasan bagi militer untuk meng kudeta pemerintahannya.

Berbeda dengan Ennahda di Tunisia, partai tersebut menyetujui untuk menyusun konstitusi baru Tunisia berdasarkan mekanisme dan prinsip demokrasi. Hal ini terbukti ketika pada tanggal 26 Maret 2012, Ennahda membuat keputusan bahwa syariah tidak akan dimasukkan ke dalam konstitusi. Peristiwa kudeta militer atas Morsi di Mesir dimanfaatkan oleh kelompok oposisi Ennahda di Tunisia pada masa protes anti pemerintahan Troika menguat. Seorang elit partai Nidaa Tounes dari kelompok sekuler membuat pernyataan bahwa 'Kegagalan Ikhwanul Muslimin di Mesir telah menunjukkan bahwa Islam politik sudah ketinggalan zaman. Semua cabang regional Ikhwanul Muslimin, termasuk Ennahda,

sekarang akan ditutup secara otomatis' (Wolf, 2017:154). Untuk menyelamatkan Ennahda dari nasib yang sama dengan Ikhwan di Mesir, Rachid Ghannouchi segera mengeluarkan pernyataan bahwa 'Mohammed Morsi telah melakukan kesalahan' dan menekankan bahwa Ennahda merupakan sebuah partai di Tunisia yang mendukung gagasan kesesuaian antara Islam dan demokrasi (Wolf, 2017:154).

Ada sebuah wawancara dengan salah satu aktivis Ennahda, untuk meminta pendapatnya mengenai Ikhwanul Muslimin. Ketika ditanya tentang apakah saat ini Ikhwanul Muslimin masih menjadi model bagi Ennahda (karena dalam sejarahnya –sebagaimana yang penulis telah jelaskan sebelumnya– Ikhwan telah menjadi model inspirasi bagi Rachid Ghannouchi dalam mendirikan *al Jama'a al Islamiyyah*, embrio awal Ennahda), aktivis Ennahda menjawab, "Tanyakan siapa saja di Ennahda. Kita lebih maju dari pada Ikhwan. Kami mencari model Turki ... modern dan Muslim pada saat yang sama" (Marks, 2015). Presiden Ennahda, Rachid Ghannouchi, juga berkomentar dengan bahasa yang diplomatis mengenai model Turki: "AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi / Justice and Development Party / Partai Keadilan dan Pembangunan*) secara bertahap akan membuat Turki negara yang lebih Muslim... melalui pendidikan, membangun ekonomi, dan kebebasan media. Itu model kami – bukan melalui aspek hukum–. Buatlah orang menyukai Islam. Yakinkanlah, tapi jangan memaksa mereka" (Marks, 2015).

Adanya pergeseran 'model', dari awalnya condong pada Ikhwanul Muslimin menuju ke partai AKP Turki, sekali lagi menunjukkan bahwa Ennahda menyadari tentang gagasan Islamisme yang telah kehilangan daya tariknya dalam setiap bidang persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebab, kehadiran Islamisme dinilai tidak mampu menjawab persoalan-persoalan proses perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik dari perkembangan dinamika global. Atas dasar ini, penulis berasumsi bahwa insiden kudeta militer terhadap rezim Mohamed Morsi di Mesir pada tahun 2013, menjadi salah satu alasan yang melandasi Ennahda mengubah strategi politiknya pada tahun 2016.

### **Penurunan Daya Tarik Pemerintahan Koalisi Pimpinan Ennahda (Troika) di Tunisia**

Pemerintahan koalisi Ennahda yang terbentuk setelah pemilihan Majelis Konstituante Nasional (NCA / *National Constituent Assembly*) pada tanggal 23 Oktober 2011 terdiri dari tiga partai yang mendapat suara terbanyak. Partai CPR (*Congrès pour la République*) dan *at-Takattul ad-Dīmuqrāfī min ajl il-'Amal wal-Hurriyyāt* (Ettakol; FDTL / *Forum démocratique pour le travail et les libertés*) setuju untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan Ennahda, yang kemudian dikenal sebagai Troika. Pemerintahan dipimpin oleh Hemadi Jebali, sekretaris jenderal Ennahda, dan terdiri dari 25 menteri, 11 diantaranya berasal dari Ennahda, 5 dari Ettakol, 4 dari CPR, dan 5 orang independen (Guazzone, 2013). Koalisi pemerintahan Troika mendapat mandat untuk menyusun konstitusi Tunisia dan undang-undang pemilihan yang baru.

Pada periode pemerintahan sejak tahun 2011 hingga akhir 2013, Ennahda menghadapi tantangan politik yang berat dalam upayanya untuk menciptakan stabilitas politik pasca pemberontakan terhadap Ben Ali. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Ennahda, seperti: Memulihkan situasi sosial-ekonomi, mengatasi gerakan kelompok ekstremis dan teroris yang semakin meningkat, dan konflik kepentingan antar aktor politik. Ketidakmampuan pemerintahan Ennahda dalam mengatasi beberapa persoalan dari tantangan-tantangan tersebut menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai Islamis tersebut.

Dalam persoalan sosial-ekonomi, Ennahda tidak mampu memulihkan kondisi perekonomian Tunisia. Menurut data dari NIS (*National Institute of Statistics*), kondisi

perekonomian pada era pemerintahan Ennahda semakin memburuk. Tingkat pengangguran telah meningkat dari 13 persen pada 2010 menjadi 17 persen pada 2012. Inflasi mencapai hampir 10 persen dan cadangan hard currency bank sentral mencakup kurang dari tiga bulan impor. Tingkat standar hidup di seluruh negeri sangat buruk, dengan 2,5 juta dari populasi 11 juta hidup di bawah garis kemiskinan \$ 2 per hari (Ayari, 2015). Situasi ekonomi yang memburuk ini menjelma menjadi konflik sosial dan memicu pemogokan kerja serta demonstrasi jalanan berturut-turut. Pada bulan Juli 2012 terjadi demonstrasi di Sidi Bouzid, lalu pada bulan Oktober di Kasserine (Guazzone, 2013).

Identitas partai yang melekat pada dirinya sebagai Islamis, sering menjadi sumber dari beberapa masalah dalam pemerintahannya. Misalnya dalam aspek keamanan publik, Ennahda membuat kebijakan untuk merangkul kelompok Salafi agar aktivitas-aktivitasnya mengikuti tata cara yang legal dan demokrasi melalui pembentukan partai politik. Pemerintahan Troika (koalisi pemerintahan pimpinan Ennahda) memberi lisensi atas Partai Front Reformasi Salafi (*Hizbu Jabhat al-Islah*) pada tanggal 29 Maret 2012, dan Hizbu al-Tahrir pada tanggal 12 Juli 2012. Langkah kebijakan pemerintahan Ennahda tersebut, mendapat penentangan keras dari kubu oposisi khususnya kelompok sekuler. Kelompok sekuler menuduh Ennahda bersekongkol dengan kelompok-kelompok Salafi untuk menjalankan agenda Islamisasi masyarakat Tunisia. Sehingga, kelompok sekuler maupun oposisi Ennahda kerap menentang kebijakan pemerintahannya yang cenderung mengistimewakan kelompok Islamis dan dinilai mengundang bahaya bagi Tunisia. Puncaknya pada bulan Februari dan Juli 2013 di Tunis, terjadi sebuah insiden pembunuhan dua politisi oposisi, Chokri Belaid dan Mohammed Brahmi. Seorang warga negara Tunisia keturunan Perancis yang nantinya bergabung dengan kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syiria*), Abou Bakr al-Hakim (alias Abou Mouqatel), pada bulan Desember 2014 mengklaim bahwa dirinya yang melakukan aksi pembunuhan tersebut. Pihak oposisi menuduh Ennahda terlibat dalam insiden pembunuhan dua politisi oposisi yakni Chokri Belaid dan Mohammed Brahmi. Insiden tersebut memicu aksi protes besar-besaran dan akhirnya memaksa pemerintah Troika untuk mengundurkan diri (Wolf, 2017:151-152).

Sebuah survei terhadap opini publik mengenai apakah arah pemerintahan koalisi Troika pimpinan Ennahda sudah tepat atau menyimpang dilakukan oleh International Republican Institute. Hasil survei menyatakan bahwa pasca bulan Januari 2012, terjadi peningkatan pandangan bahwa pemerintahan Tunisia bergerak ke arah yang salah atau tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penilaian negatif tersebut mulai muncul dipertengahan tahun 2012, yaitu lebih tepatnya pada bulan April 2012. Pandangan negatif atau ketidakpuasan masyarakat tersebut terus mendominasi hingga bulan Oktober 2013 di mana komposisinya adalah; 16% melihat pemerintah berjalan ke arah yang benar dan 79% menganggap pemerintah berjalan ke arah yang salah. Hampir mayoritas masyarakat melihat pemerintahan Tunisia di bawah Ennahda tidak berada dalam kondisi yang baik dan bergerak ke arah yang salah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ennahda sudah mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat Tunisia sejak tahun 2012 (International Republican Institute, 2014).

Setelah mundur dari kekuasaan, Ennahda lebih fokus melakukan evaluasi mengenai pergerakan politiknya. Sehingga pada akhirnya, Rachid Ghannouchi di dalam kongres ke-10 mengumumkan bahwa Ennahda telah meninggalkan 'Islam politik' dan akan menjalankan politik identitas yang baru yakni 'demokrat muslim'. Ghannouchi juga menjelaskan bahwa Ennahda bertujuan untuk memberikan perlindungan konstitusi bagi kelompok non-muslim maupun yang atheis. Istilah 'demokrat muslim' mendorong gerakan partai Ennahda untuk

bersikap yang lebih moderat terhadap kelompok muslim maupun kelompok non-muslim (Ibish, 2016).

Keputusan untuk mengubah identitas diri partai menjadi ‘demokrat muslim’ berarti bahwa pejabat Ennahda terpilih tidak dapat terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti dakwah di masjid; serta tidak akan lagi diizinkan untuk secara bersamaan memegang posisi dalam partai dan masyarakat sipil, termasuk masjid dan organisasi Islam (Wolf, 2017:161; Souli, 2016a). Adapun pernyataan resmi partai Ennahda tentang alasan penggunaan dan pelestarian identitas barunya tersebut, yakni ‘demokrat muslim’, karena ingin memisahkan diri dari kelompok teroris serta ekstremis yang berpolutik atas nama Islam seperti ISIS; untuk mewujudkan tegaknya konstitusi baru Tunisia yang melindungi kebebasan beragama; dan juga membatasi gerakan politik dari kelompok sekularisme ekstrem. Rachid Ghannouchi dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk Islam Politik di Tunisia (Souli, 2016a).

Memang, keruntuhan Ennahda dari kekuasaan tidak hanya disebabkan dari aspek ideologis Islamisme saja, namun juga lambannya perkembangan perekonomian dalam negeri tersebut. Tetapi peristiwa-peristiwa pada saat menjelang kemunduran Ennahda dari kekuasaan, seperti dugaan masyarakat atas keterlibatan Ennahda dalam pembunuhan dua politisi oposisi, menunjukkan bahwa perlunya pembenahan pergerakan politik dalam aspek ideologis dari partai tersebut. Sehingga menurut hemat penulis, pelemahan daya tarik simbol gerakan Islamisme yang ditunjukkan dengan adanya ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai Islamis Ennahda; menjadi penyebab yang mempengaruhi sikap dan perubahan strategi politik partai tersebut di Tunisia pada tahun 2016.

#### **4. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan strategi politik partai Ennahda di Tunisia pada tahun 2016 karena adanya: tantangan politik yang baru, yakni kondisi lingkungan politik yang plural dan tuntutan kompromistik dalam rangka membangun masyarakat madani (*civil society*); Kemunculan gerakan Islam garis keras serta kelompok ekstremis di Tunisia; Peristiwa kudeta militer atas Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 2013, dan; Peningkatan ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai tersebut.

Adanya realitas masyarakat yang menuduh Ennahda terlibat dalam pembunuhan dua politisi oposisi, menunjukkan bahwa perlunya pembenahan pergerakan politik dalam aspek ideologis dari partai tersebut. Selain itu, adanya peristiwa kudeta militer terhadap Ikhwanul Muslimin pada tahun 2013 mengakibatkan Ennahda perlu mengamankan diri agar tidak terkena nasib yang sama dengan Ikhwan di Mesir. Oleh karena itu, Rachid Ghannouchi segera mengeluarkan pernyataan bahwa ‘Mohammed Morsi telah melakukan kesalahan’ dan menekankan bahwa Ennahda merupakan sebuah partai di Tunisia yang mendukung gagasan kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Bahkan Rachid Ghannouchi dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk Islam Politik di Tunisia. Sehingga menurut hemat penulis, pelemahan daya tarik simbol gerakan Islamisme yang ditunjukkan dengan adanya ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai Islamis Ennahda; menjadi penyebab yang mempengaruhi sikap dan perubahan strategi politik partai tersebut di Tunisia pada tahun 2016.

Perubahan strategi politik partai Ennahda yang dicirikan dengan identitas baru sebagai ‘demokrat muslim’ dimaksudkan agar partai Ennahda bersikap lebih moderat terhadap kelompok muslim maupun kelompok non-muslim. Pendiri Ennahda, Rachid Ghannouchi,

menjelaskan bahwa tujuan partai tersebut adalah untuk memberikan perlindungan konstitusi bagi kelompok non-muslim maupun yang atheis. Selain itu, Ennahda ingin membuat perbedaan yang jelas antara kelompok ekstremisme serta terorisme dengan partainya sebagai gerakan politik yang moderat. Tujuan perubahan strategi politik partai Ennahda juga untuk memerangi ekstremisme yang ada di Tunisia.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alexander, C. 2016. *Tunisia From Stability To Revolution In The Maghreb*. New York: Routledge.
- Tibi, B. 2012. *Islamism and Islam*. New Haven & London: Yale University Press.
- Wolf, A. 2017. *Political Islam in Tunisia The History of Ennahda*. New York: Oxford University Press.

### Jurnal

- al-Anani, K. 2015. Upended path: the rise and fall of Egypt's muslim brotherhood. *The Middle East Journal* . Vol. 69, No.4, Hal. 527-543.
- Ayari, F. 2015. Ennahda movement in power: a long path to democracy. *Contemporary Review of the Middle East*. Vol. 2, No.1-2, Hal. 135-142.
- Bayat, A. 1996. The coming of a post-islamist society. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*. Vol. 5, No. 9, Hal. 43-52.
- Guazzone, L. 2013. Ennahda islamist and the test of government in Tunisia. *The International Spectator*. Vol. 48, No. 4, Hal. 30-50.
- Hossain, A. A. 2016. Islamism, secularism and post-Islamism: the Muslim world and the case of Bangladesh. *Asian Journal of Political Science*, Vol. 24, No. 2, Hal. 214-236.
- Louden, S. R. 2015. Political islamism in Tunisia: a history of repression and a complex forum for potential change. *Mathal*. Vol. IV, No. 1, Hal. 2.
- Machairas, D. 2017. The strategic and political consequences of The June 1967 War. *Cogent Social Sciences*. Vol. 3, No. 1.
- Marks, M. 2015. Tunisia's Ennahda: Rethinking Islamism in the context of ISIS and the Egyptian coup. *Rethinking Political Islam Series*.

### Artikel & Reportase

- International Republican Institute. 2014. *Survey of Tunisian Public Opinion June 22-July 1, 2014*. International Republican Institute.

### Situs Internet

- Affan, M. 2016. *The Ennahda Movement ... A Secular Party?*. ALSHARQ FORUM: <http://www.sharqforum.org/2016/06/14/the-ennahda-movement-a-secular-party/>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].
- Bleiweis, S. 2016. *Muslim Democrats? Tunisia's Delicate Experiment*. Foreign Policy Association: <http://foreignpolicyblogs.com/2016/09/30/muslim-democrats-tunisia-experiment/>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].
- Ghannouchi, R. 2016. *From Political Islam to Muslim Democracy The Ennahda Party and the Future of Tunisia*. Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/political-islam-muslim-democracy>. [Diakses pada tanggal 15 Januari 2017].
- Ibish, H. 2016. *'Islamism Is Dead!' Long Live Muslim Democrats*. The New York Times: [https://www.nytimes.com/2016/06/03/opinion/tunisias-new-revolution.html?\\_r=1](https://www.nytimes.com/2016/06/03/opinion/tunisias-new-revolution.html?_r=1). [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].

- Internationalrelations.Org. (t.thn.). *Ennahda*. <http://internationalrelations.org/ennahda/>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].
- Julio, E. 2017. *HISTORIPEDIA: Militer Gulingkan Presiden Mesir Mohamed Morsi*. Okenews: <https://news.okezone.com/read/2017/07/02/18/1726772/historipedia-militer-gulingkan-presiden-mesir-mohamed-morsi?page=1>. [Diakses pada tanggal 3 Juli 2019].
- Koch, R. 2014. *Islam and Politics in Tunisia*: [https://www.sciencespo.fr/kuwait-program/wp-content/uploads/2018/05/KSP\\_Paper\\_Award\\_Spring\\_2015\\_KOCH\\_Rebecca.pdf](https://www.sciencespo.fr/kuwait-program/wp-content/uploads/2018/05/KSP_Paper_Award_Spring_2015_KOCH_Rebecca.pdf). [Diakses pada tanggal 24 Juni 2019].
- Souli, S. 2016a. *What is left of Tunisia's Ennahda Party?*. Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2016/05/left-tunisia-ennahda-party-160526101937131.html>. [Diakses pada tanggal 14 Desember 2016].
- \_\_\_\_\_. 2016b. *Why Tunisia's Top Islamist Party Rebranded Itself*. Al-Monitor: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/tunisia-ennahda-islamist-party-rebranding-congress.html>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].
- The Guardian. 2014. *Tunisia Election Results: Nida Tunis Wins Most Seats, Sidelining Islamists*. The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2014/oct/30/tunisia-election-results-nida-tunis-wins-most-seats-sidelining-islamists>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].
- Tempo.co. 2013. *Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan*. Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/493383/empat-alasan-presiden-mesir-digulingkan/full&view=ok>. [Diakses pada tanggal 8 April 2019].